

Pertahankan Predikat Tercepat Penyerahan LPKD

PONTIANAK. Pemerintah Kabupaten Pontianak tidak mau dicap daerah yang kurang disiplin dalam menyerahkan Laporan Penggunaan Keuangan Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar. Predikat daerah tercepat pada tahun lalu, akan dipertahankan.

"Kita akan berusaha lebih cepat lagi," kata H Ria Norsan, Bupati Kabupaten Pontianak kepada sejumlah wartawan di kantor DPRD Kalbar saat menghadiri rapat tentang Food Estate, kemarin (25/1).

Norsan tidak menyebutkan tanggal pasti kapan akan menyerahkan LPKD tersebut. Namun ia bertekad agar penyerahan itu tidak molor dari waktu yang telah ditentukan. "Paling lambat bulan Maret ini," ucapnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-

Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, tiap tahun Pemerintah Daerah (Pemda) harus memberikan LPKD ke BPK. Pemberian LPKD itu paling telat tiga bulan setelah tahun anggaran berlangsung.

Untuk LPKD tahun anggaran 2010, harus sudah diserahkan minimal 31 Maret tahun ini. Jika telah, berarti daerah tersebut molor alias kurang disiplin dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk tahun anggaran 2009, Kabupaten Pontianak berhasil menjadi yang terbaik dalam penyerahan LPKD ke BPK. Kabupaten yang terkenal dengan Mpu Daeng Manambon tersebut menyerahkannya pada tanggal 17 Maret 2010.

Berdasarkan data BPK Perwakilan Kalbar, selain Kabupaten Pontianak, ada empat daerah lain yang menyerahkan

LPKD tepat waktu. Kota Pontianak, Bengkayang, Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya (KKR).

Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kayong Utara (KKU), dan Pemprov Kalbar menyerahkan bulan April. Kabupaten Sekadau dan Kota Singkawang menyerahkan pada bulan Mei 2010. Sedangkan Kabupaten Landak memberikan pada bulan Juni 2010.

Saat ini Kabupaten Pontianak tengah berupaya keras menyusun laporan penggunaan keuangannya. Menurut Norsan, penyusunan keuangan tidak menemukan kendala berarti. "Yang sedikit bermasalah hanya soal pembagian asset saja. Soalnya asset kita ada juga yang terbagi dengan KKR," papar Norsan. (bdu)